

Susi Dwi Harijanti

Kuliah Pembuka Ilmu Perundang-undangan

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

7 September 2023

PERMASALAHAN DASAR REFORMASI REGULASI



PENDAHULUAN

01

Pentingnya peraturan perundang-undangan yang baik sebagai sumber hukum utama di Indonesia (negara Eropa Kontinental).

02

Dukungan regulasi bagi Indonesia sebagai negara yang sedang membangun.

03

Regulasi yang ada saat ini masih bermasalah, mulai dari hiper-regulasi, tumpeng tindih substansi, dan proses pembentukan yang tidak akuntabel & transparan.

04

Kesadaran reformasi regulasi, dari pihak politisi maupun birokrasi, sudah ada namun masih jauh dari realisasi.



PERMASALAHAN REGULASI

Permasalahan
Regulasi
(PSHK, 2019):

Perencanaan peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron dengan perencanaan pembangunan.

Ketidaksesuaian bentuk dengan materi muatan peraturan perundang-undangan.

Hiper-regulasi.

Tidak adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi peraturan yang sudah berlaku.

Kelembagaan belum memadai.

Tambahan: Banyak peraturan yang dibentuk tidak sesuai dengan kebutuhan Masyarakat (analisis kebutuhan tidak memadai).

PERMASALAHAN REFORMASI

- 1) **Regulatory capture:** Oligarki politik mendorong pembentukan peraturan untuk “kepentingan kelompok” yang berkuasa, dibanding untuk kepentingan umum.
- 2) **Ego-sectoral:** Sektor pada struktur birokrasi maupun pasar (market) memiliki kepentingan yang diverse dan cenderung berkukuh dengan kepentingan sektoralnya.
- 3) **Daya dukung teknokrat pembentuk peraturan (legal drafter):**
 - 1) Struktur staff pendukung fungsi pembentuk peraturan belum memadai, terutama di daerah (Pemerintah Daerah & DPRD).
 - 2) Belum terinternalisasinya kultur membentuk peraturan dengan scientific (evidence-base) pada birokrasi.
 - 3) Kualitas naskah akademik masih belum handal, bahkan sering menjadi formalitas.





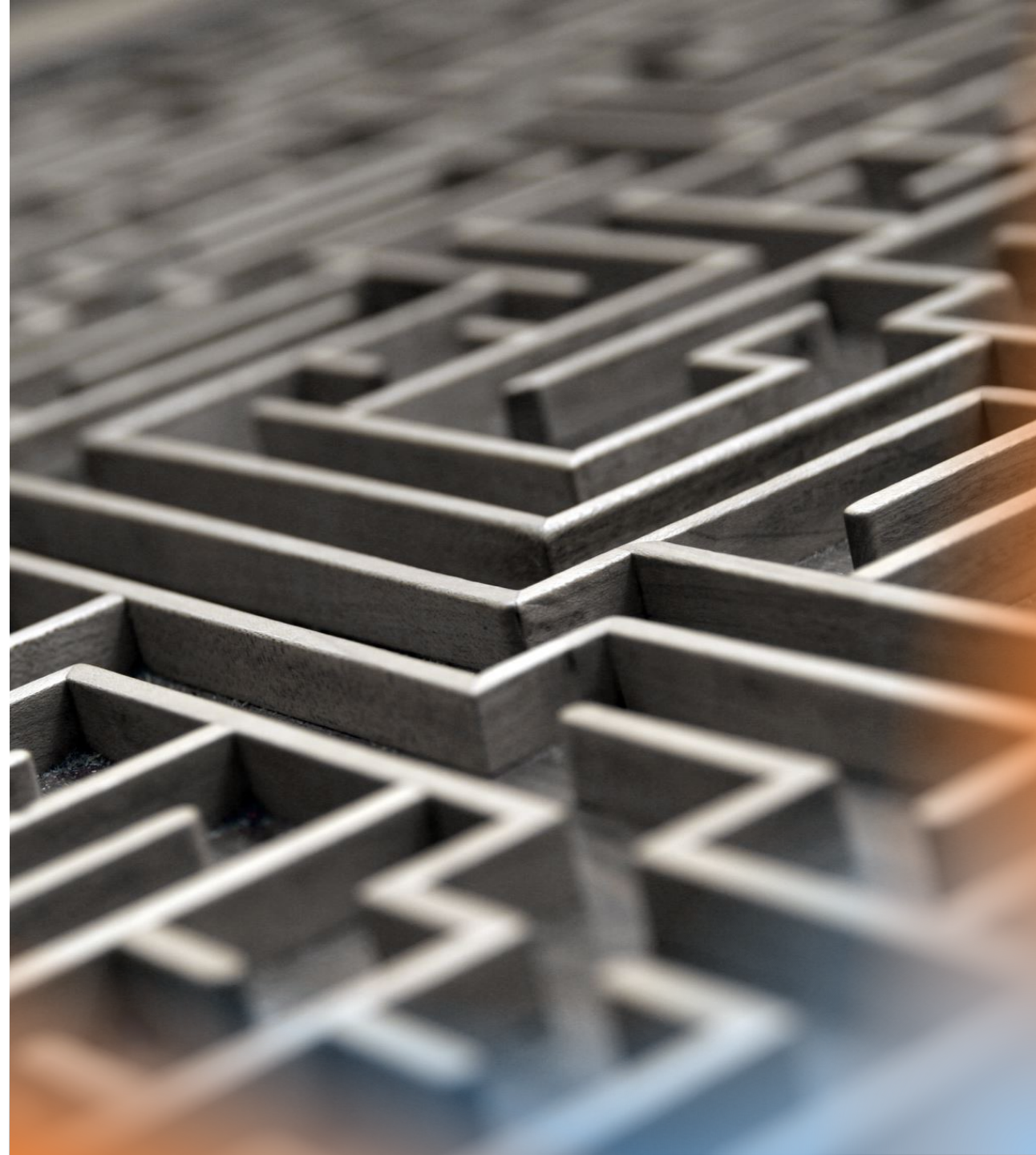
PERSPEKTIF: DOKTRIN LEGISPRUDENSI

- 1) **Konsep yang menghendaki adopsi justifikasi rasional pada legislasi**
 - a. Legisprudence requires legislators to provide legitimation, an active justification process, of the reasonableness of the norms it legislates – Luc J. Wintgens
- 2) **Justifikasi sebagai cara untuk mengimbangi sifat politis pembentukan UU:**
 - a. Justification as a balancing mode to the political dimension of the legislative process – Jan Sieckman
- 3) **Deliberasi sebagai proses justifikasi:**
 - a. Legislative institution as public representation requires justification through the interaction between the public and the legislators – Luc J. Wintgens
 - b. Dialectical deliberation has justifying effects, and justification requires dialectical deliberation – Hannele Isola-Miettinen, Luc J. Wintgens
 - c. Rationality is multidimensional, gradual, and relative concept, hence deliberation facilitates objectification of rationality in lawmaking – Oliver-Lalana
- 4) Konsep ini dapat diimplementasi melalui proses penyusunan dan prosedur pembentukan peraturan yang memadai (Naskah akademik dan Partisipasi Bermakna)

BEBERAPA PRINSIP REFORMASI REGULASI

(Regulatory Reform Policy, British
Columbia, Canada)

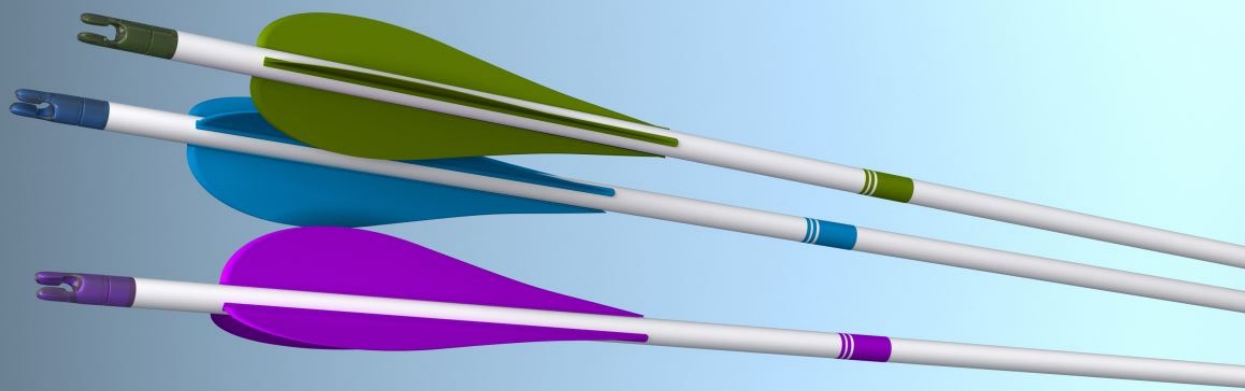
- **PRINCIPLE 1: Identify the Best Option**
- To determine the scope of the problem being addressed by the regulatory change, regulators should consider the problem they want to solve, ensuring this is the best approach to achieve the desired outcomes.
- A full range of options, including non-regulatory options, should be explored before identifying the best possible option for achieving desired outcomes.
- When applying this principle, the questions that should be considered are: what is the problem, how could the problem be resolved, and what are the advantages and disadvantages of each option
- **PRINCIPLE 2: Assess the Impact on People, Business and Government**
- When developing new or amending statutes, regulations and associated policies and forms, one must consider how to achieve the greatest benefit and lowest cost to affected groups. The direct and indirect costs and benefits of the proposed change must be evaluated to minimize the compliance burden. This involves identifying affected groups as well as the nature, magnitude and duration of the impacts.





BEBERAPA PRINSIP...

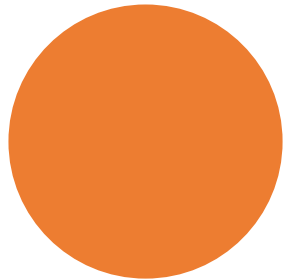
- **PRINCIPLE 3: Consult and Communicate**
- Consultation with impacted people, businesses, and other relevant stakeholders is a best practice before regulatory changes are made. Parties affected by the change should be consulted and have an opportunity to provide feedback. The ministry leading the legislative and regulatory change should have a plan to clearly and openly communicate the change, its impact and compliance requirements, in a way that is accessible to all target audiences.
- **PRINCIPLE 4: Streamline Design**
- When developing regulatory changes, options for streamlining must be considered to avoid duplication, overlap, inconsistencies and contradictions with other agencies or levels of government. Look for opportunities to minimize the number of steps, decrease processing times, improve access, or develop user-friendly online services to reduce the required time and costs. Determine how the proposed change streamlines the regulatory process.



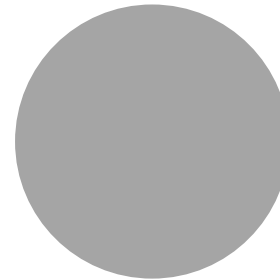
BEBERAPA PRINSIP...

- **PRINCIPLE 5: Evaluate Regulation Effectiveness**
- Statutes, regulations, and associated policies and forms should be reviewed regularly to ensure they are achieving desired outcomes. Quantitative and qualitative measurements should be used to determine how effective the legislation has been in achieving its goal and whether it should be amended or repealed.

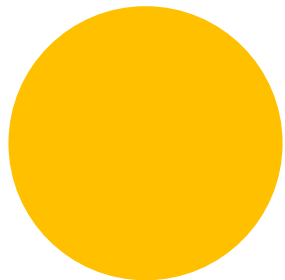
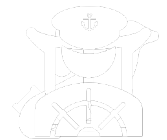
BEBERAPA PELUANG PERBAIKAN



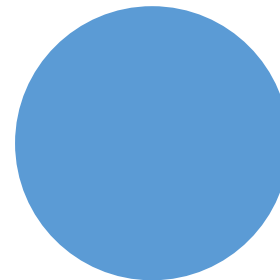
Sinkronisasi perencanaan pembangunan dan perencanaan peraturan perundang-undangan secara struktural dan prosedural.



Pembentukan peraturan perundang-undangan secara scientific dan berdasarkan analisis kebutuhan yang lebih terukur.



Pelembagaan pemantauan dan evaluasi peraturan yang berlaku secara rutin (contoh: sunseting clause).



Perbaiki sistem dan aktor politik yang lebih sehat (sistem pemilu dan demokrasi internal partai)

TERIMA KASIH